

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa KPP Pratama Pulo Gadung telah menerapkan pengendalian intern yang cukup baik, namun demikian belum memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan penerimaan PPN dengan kondisi sebagai berikut :

- a. Belum semua Wajib Pajak mematuhi kewajiban untuk membayar pajak khususnya PPN.
- b. Proses pengolahan data masih bersifat manual dan pada saat ini baru dalam tahap komputerasi.
- c. Masih adanya aparat KPP Pratama Pulo Gadung yang mengutamakan kepentingan pribadinya.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat dikemukakan saran – saran sebagai berikut :

- a. Aparat KPP Paratama Pulo Gadung sebaiknya terus meningkatkan upaya dengan berbagai cara persuasif agar semua Wajib Pajak mematuhi kewajiban pembayaran pajak.

- b. Sebaiknya KPP Pratama Pulo Gadung mempercepat proses pengolahan data dari manual ke komputerisasi.
- c. Pimpinan KPP Pratama Pulo Gadung sebaiknya terus memberikan pengarahan dan peringatan agar ke aparat pajak untuk lebih mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan pribadi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Perpajakan..2006. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sukardji, Untung. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi 2006. Jakarta  
Rajawali Pers.
- Widjaja, Amin. 2000. *Coso Based Auditing*. Jakarta : Harvarindo
- Supranto. 2003. *Metode Riset*. Edisi Revisi ke 7. Jakarta : IKAPI
- Sukardji, Untung. 2002. *Modul PPN (Diktat)*. Jakarta : Departemen  
Keuangan Republik Indonesia.
- Suandy, Early. 2001. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sawyer's. 2002. *Internal Auditing*. Jakarta : Salemba Empat.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia Edisi ke-6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yani, Ahmad. 2007. *Solusi Masalah PPN*. Jakarta : Renada Media Grup.
- Jusf, Amir Abadi.2002. *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat
- Anastasia, Diana. 2004. *Perpajakan Indonesia Keosep, Aplikasi, dan  
Penuntun Praktis*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Arief Ramadhani  
NIM : 03420021  
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 16 Juni 1985  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Raya Wijaya Kusuma No.9  
Perumnas Klender Jak-Tim  
Tlp : 085697888161

### Pendidikan Formal

- Mahasiswa Universitas Darma Persada dan Tahun 2003 -  
sekarang sedang dalam tahap penyelesaian skripsi
- SMU BPSK Jakarta Timur Tahun 2000 - 2003
- SLTP Negeri 213 Jakarta Timur Tahun 1997 - 2000
- SD Negeri 11 Pagi Jakarta Timur Tahun 1991 - 1997

LAMPIRAN - LAMPIRAN





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Jalan Pramuka Raya Kav. 31  
Jakarta

Telepon : 859-0021  
Faksimili : 859-1991

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: Ket-23/WPJ.20/KP.0301/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Bakrin, M.Si  
NIP : 060046392  
Pangkat / Gol. : Pembina / IV.a  
Jabatan : Pjs. Kepala Kantor

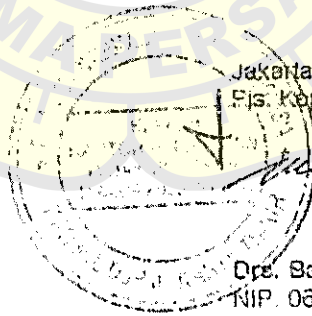
dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Arief Ramadhan  
NIM : 03420021  
Jurusan : Akuntansi Perpeajakan  
Universitas : Universitas Darma Persada

benar telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung selama 1 (satu) bulan yaitu sejak tanggal 13 Agustus 2007 sampai dengan 11 September 2007.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 September 2007  
Pjs. Kepala Kantor,



Drs. Bakrin, M.Si  
NIP. 060046392

**LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI**

NAMA MAHASISWA : ARIEF RAHADHAN  
NIM : 03420021  
DOSEN PEMBIMBING : Haryanto, Des Ak. MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	24/9 '07	Revisi Bab I	✓
II	12/11 '07	Bab II	✓
III	5/ '08	Bab III	✓
IV	15/1 '08	Bab IV	✓
V	17/1 '08	Bab V	✓
VI		Acc yg diagulkan dalam Bingkai Skripsi	✓

Tanggal mulai bimbingan : 24-9-2007

Tanggal selesai bimbingan : 17-6-2008

**CATATAN :**

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN  
Beri tanda X dalam  yang sesuai

FORMULIR

# 1107

Nama PKP : \_\_\_\_\_ NPWP :  -  -  -  -  -

Alamat : \_\_\_\_\_ Masa :  s.d.

No. Telp. : \_\_\_\_\_ Pembetulan No. : \_\_\_\_\_ (.....)

Usaha : \_\_\_\_\_  Wajib PPh BM

Perhatian  
Seturut dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

### I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :	D?P	PPN	
1. Ekspor	Rp		<input type="text"/>
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	Rp	<input type="text"/>
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp	Rp	<input type="text"/>
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp	Rp	<input type="text"/>
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	Rp	<input type="text"/>
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp	Rp	<input type="text"/>
B. Tidak Terutang PPN	Rp		<input type="text"/>
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + B)	Rp		<input type="text"/>

### II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (jumlah PPN pada I.A.2)	Rp	<input type="text"/>
B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	<input type="text"/>
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	<input type="text"/>
D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp	<input type="text"/>
E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan	Rp	<input type="text"/>
F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp	<input type="text"/>
G. PPN yang kurang dibayar dilunasi tanggal .....	NTPP	<input type="text"/>

PPN lebih dibayar pada :

Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)     Butir II.D atau  Butir II.E (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya     Dikompensasikan ke Masa Pajak .....

Dikembalikan (Restitusi)     Kegiatan Tertentu     Dokumen terlampir

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu     Dokumen disusulkan

Prosedur biasa     Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

### III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	Rp	<input type="text"/>
B. PPN Terutang	Rp	<input type="text"/>
C. Dilunasi Tanggal .....	NTPP	<input type="text"/>

### IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAHI

A. PPh BM yang harus dipungut sendiri	Rp	<input type="text"/>
B. PPh BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama	Rp	<input type="text"/>
C. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)	Rp	<input type="text"/>
D. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibatalkan	Rp	<input type="text"/>
E. PPh BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)	Rp	<input type="text"/>
F. PPh BM kurang d. bayar dilunasi tanggal .....	NTPP	<input type="text"/>

Lampiran :  Lembar ke- 3 SSP PPN     Lembar ke- 3 SSP PPh BM

Surat Kuasa Khusus     .....

**Pernyataan**  
 Di sini saya menyatakan akan mengisi jabatan, saya bertanggung jawab atas apa yang telah saya tulis, bukan di atas bawahan lampiran yang saya isi di atas, saya yakin, saya dan tidak berbohong.

Tanda Tangan : \_\_\_\_\_ Kuasa    \_\_\_\_\_ Pengurus

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Cap Perusahaan : \_\_\_\_\_

PKP  
 Kuasa